



JARINGAN PERDAGANGAN SENJATA PAD MASA GERAKAN DI/TII
SULAWESI SELATAN 1950-1965

Weapons Trafficking on The DI/TII South Sulawesi 1950-1965

Ahmad Subair

Pendidikan IPS, Kekhususan Pendidikan Sejarah

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Makassar

e-mail : Baircool4@gmail.com

ABSTRAK

Gerakan DI/TII di Sulawesi-Selatan adalah salah satu gerakan subversif terlama di Indonesia. Awalnya gerakan ini merupakan gerakan protes terhadap pemerintah pusat. Dari aksi protes tersebut hingga akhirnya lahir lah DI/TII. Gerakan ini berawal pada tahun 1950 dengan nama KGSS, kemudian berganti menjadi CTN tahun 1951. Setelah kegagalan integrasi Gerilya ke TNI, gerakan ini berganti nama menjadi DI/TII hingga berakhir pada tahun 1965. Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan selalu menarik untuk diteliti lebih dalam. Khususnya tentang pengendalian ekonomi yang sangat berkaitan erat dengan pasokan persenjataan dan logistik DI/TII. Untuk mengungkap pengendalian ekonomi dan pasokan persenjataan DI/TII terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu (i) untuk mengetahui bagaimana gerakan ini bertahan dan mendapatkan senjata? (ii) untuk mengetahui bagaimana gerakan ini dapat mengendalikan perekonomian Sulawesi Selatan (iii) untuk mengetahui kepentingan perjuangan DI/TII dan kepentingan perekonomian bekerja bersama?

Dalam mengungkap peristiwa DI/TII di masa lalu, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu (i) Heuristik (ii) Kritik (iii) Interpretasi (iv) Historiografi. Dibantu dengan pendekatan teori ilmu bantu lain, seperti (i) teori konflik (ii) Teori jaringan (iii) Taktik Gerilya.

Hasil penelitian Ini menunjukkan bahwa (i) Gerakan DI/TII dapat bertahan lama disebabkan oleh adanya pasokan senjata yang cukup kuat untuk Gerakan ini. (ii) untuk menguasai perekonomian Sulawesi selatan DI/TII melakukan gerakan blokade ekonomi. Dengan cara menguasai daerah-daerah penghasil komoditas yang laku di pasaran khususnya kopra (iii) untuk memperjuangkan tujuannya Gerakan DI/TII butuh senjata. Oleh sebab itu DI/TII kemudian yang menguasai hasil bumi di daerah pelosok Sulawesi-Selatan melakukan barter dengan senjata. DI/TII secara. Dalam usaha-usaha tersebut, DI/TII di lindungi oleh “Alat Negara” yang berkuasa d daerah-daerah Sulawesi-Selatan.

Keywords: *DI/TII, South Sulawesi, Perdangangan Senjata, Penyeludupan Senjata, Gerakan Subversif, Qahhar Mudzakkar.*

ABSTRACT

The DI/TII Movement in South Sulawesi is one of longest subversive movement in Indonesian. Initially in the movement is a protest on central government. From the protes action, DI/TII was then existed. The movement was started in the 1950 under the name KGSS. Then it challenged to CTN in 1951. After the integration of Guerilla to TNI (Army) failed, the movement was changed under the name DI/TII to the end of the movement in 1965. The DI/TII movement in South Sulawesi has always been interesting to be examined comprehensively, particularly on economic control which is closely related to weaponry supply and logistic of the DI/TII. In order discover the economic control and weaponry supply of DI/TII, there are research objective to be achieved, namely (i) to examine how the movement survive and obtain the weapon, (ii) to examine how the movement can control the economic in South Sulawesi, and (iii) to examine significance of the struggle of the DI/TII and significance of economy collaboratively.

In order to reveal DI/TII in the past, the study employed history research method, namely (i) heuristic (ii) critique (iii) interpretation (iv) historiography, assisted with other theories, namely (i) conflict theory, (ii) networking theory, (iii) and guerilla tactic.

The results of the study revel that (i) in the DI/TII movement was able survive due to a strong weaponry supply for the movement, (ii) to take control the economy in South Sulawesi, DI/TII conducted economy blokade movement by controlling the commodity-producing regions the sell well, particularly copra (iii) to fight for its purpose, the DI/TII movement needed weapon. Thus the DI/TII that controlled crops the remote areas in South Sulawesi conducted barter with weapons. DI/TII efforts were protected by apparatus state who controlled the regions in South Sulawesi.

Keywords: *DI/TII, South Sulawesi, Weaponry, Supply, Survive Movement.*

PENDAHULUAN

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 situasi tanah air tidak langsung menjadi kondusif dari berbagai kondisi. Khususnya kondisi keamanan negara merupakan point tersendiri yang menjadi fokus penyelesaian oleh pemerintah. Kondisi keamanan yang tidak pasti tersebut sangat berpengaruh terhadap sektor lainnya yang bermuara pada kesejahteraan rakyat pasca kemerdekaan.

Setali dengan isu keamanan negara yang tidak kondusif. Pemerintah Belanda pasca perang dunia II belum “ikhlas” sepenuhnya dengan kemerdekaan Indonesia. Berangkat dari rasa tidak ikhlas tersebut pemerintah Belanda menjawabnya dengan agresi militer yang disebutnya sebagai aksi polisioner terhadap daerah koloninya Indonesia.

Agresi militer Belanda terhadap kawasan Indonesia hingga tahun 1949 di dasari oleh konstalasi politik internasional pasca perang dunia II. Belanda di daratan Eropa yang luluh lantak akibat keganasan pemerintahan Nazi Jerman berusaha merajut kembali sisa-sisa kekuatan. Berakhirnya perang dunia II yang dimenangkan oleh pihak sekutu (termasuk Belanda) membuat Belanda merasa

kemerdekaan Indonesia atas Pulau Jawa, Sumatra, dan Madura (JSM).

Hasil perundingan tersebut belakangan menjadi masalah baru, karena pengakuan Belanda terhadap berdirinya negara Republik Indonesia berlaku hanya untuk ketiga pulau tersebut. Tidak berlaku untuk Indonesia-Timur, artinya Belanda dengan niatan untuk menguasai kembali tanah koloninya masih terus berlangsung. Di Indonesia-Timur yang menjadi sasaran pendudukan Belanda mengalami situasi sulit, karena jaraknya yang jauh dari Ibukota, sehingga bantuan materil untuk menghalau tindakan represif Belanda susah diperoleh.

Untuk kawasan Indonesia-Timur khususnya di Sulawesi-Selatan telah terjadi gerakan mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yang diprakarsai oleh para kaum bangsawan dan pejuang kemerdekaan. Situasi sulit dan kekuatan yang tidak berimbang dalam menghadapi aksi militer Belanda membuat beberapa kelompok

harus kembali mengamankan “Hak-nya”, baik di daratan Eropa maupun di Hindia Belanda (Indonesia). Usaha Belanda untuk kembali mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia mengalami berbagai masalah. Masalah tersebut diantaranya, Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dan merasa tidak terikat apapun dengan pemerintah Belanda. Akhirnya rencana Belanda untuk kembali ke tanah Koloninya menuai jalan terjal yang sangat panjang dan memakan banyak korban dari berbagai pihak.

Di sisi lain Indonesia sebagai negara merdeka dengan situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif harus menghadapi Belanda dengan cara apapun, baik dengan cara peperangan maupun dengan cara diplomasi. Untuk menjalankan rencananya kembali ke Indonesia, Belanda menggunakan siasat perang (*Tactic of War*). Oleh pihak Indonesia yang tidak menerima kedatangan bangsa Belanda tersebut mengadakan perlawanan sengit (*Guerilla of Tactic*). Hingga Akhirnya kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda oleh Komuniatas Internasioanal dipaksa duduk bersama di meja perundingan yang dikenal dengan Konferensi Linggarjati . Perundingan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang mengharuskan Belanda mengakui

pejuang berinisiatif untuk memberitahukan situasi di Sulawesi Selatan kepada pimpinan di Jawa. Pada saat itu Qahhar Mudzakkar berada di Jakarta dan menjadi sekretaris Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) kemudian membentuk Barisan Berani Mati (BBM) dan Kelaskaran KRIS yang beranggotakan bekas tahanan Nusakambangan dan para pejuang asal Sulawesi di Jawa.

Setiba di Yogyakarta utusan dari Sulawesi-Selatan yaitu Andi Mattalata beserta rombongan mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Dalam pertemuan tersebut Presiden Soekarno memberikan perintah agar para pejuang Sulawesi menuju Jakarta untuk menemui Perdana Menteri Sjahrir. Selain menemui Sjahrir beberapa rombongan lainnya menemui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada saat itulah terjadi komunikasi antara Qahhar Mudzakkar dengan rombongan

pejuang dari Sulawesi-Selatan (Gonggong 2004:178)

Pertemuan antara rombongan pejuang dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman membicarakan usul pembentukan Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) untuk diberangkatkan ke Sulawesi, dan Abdul Qahhar Mudzakar ditugaskan membentuk kesatuan tersebut. Itulah rencana awal kepulangan Qahhar Mudzakar ke kampung halamannya Sulawesi-Selatan sebagai tentara dengan pangkat Letnan Kolonel, didampingi Andi Matalatta sebagai wakil komandan dan Muhammad Saleh Lahade sebagai kepala staf (Gonggong 2004:78).

Dengan menggunakan nama "Ekspedisi Sulawesi" pasukan TRI (PS) atas perintah Abdul Qahhar Mudzakar diberangkatkan menuju Sulawesi. Namun ekspedisi tersebut tidak berjalan mulus, karena beberapa pasukannya tertangkap oleh Belanda, sebagian lainnya sebanyak sepuluh ekspedisi berhasil mendarat di Sulawesi. Menurut Van Dijk (1983) jumlah prajurit yang dikirim ke Sulawesi sebanyak \pm 12.000 prajurit. Abdul Qahhar Mudzakar sendiri masih berada di Jawa hingga tahun 1949 memimpin pasukan berani mati bersama sisa anggota Pasukan TRIPS untuk melawan agresi militer Belanda.

Adapun sepuluh ekspedisi yang berhasil mendarat di Sulawesi inilah di kemudian hari membentuk pasukan TRI Divisi Hasanuddin pada Konferensi Paccake di Barru pada tahun 1947. Dalam konferensi tersebut bergabung beberapa kelompok kelaskaran di Sulawesi dengan tujuan melawan dan menghalau rencana Belanda kembali menduduki pulau Sulawesi dan Indonesia Timur pada umumnya (Provinsi Sulawesi, 1953).

Menjelang berakhirnya perang mempertahankan kemerdekaan, yang di tandai dengan kesiapan Indonesia-Belanda menghadapi KMB (Konferensi Meja Bundar) muncullah beberapa masalah baru. Masalah tersebut adalah nasib gerilya di Sulawesi-Selatan yang diprediksi akan kehilangan tempat di kemudian hari. Untuk mengatasi hal tersebut Qahhar Mudzakar kemudian menugaskan Saleh Sjahban untuk melakukan persiapan reorganisasi kelaskaran di Sulawesi Selatan tahun 1949. (Gonggong, 1990)

Abdul Qahhar Mudzakar pada tahun 1949 berkedudukan sebagai Komandan

Komando Pasukan Seberang berhasil merealisasikan rencananya me-reorganisasi pasukan-pasukan kelaskaran gerilya di Sulawesi-Selatan melalui sebuah konferensi di Maros. Hasil konferensi tersebut membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan ditaksir memiliki kekuatan sebanyak 10 batalion dan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakar sebagai komandan KGSS dengan alasan dianggap berjasa karena telah mengatur pasukan perlawanan dari Jawa (Gonggong 2004:191).

Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1950 lahirlah masalah yang lebih rumit disebabkan oleh pertentangan antara pejuang pada masa revolusi fisik yang telah berubah menjadi KGSS dengan Alex Evert (AE). Kawilarang komandan T.T. VII. Disebabkan karena Abdul Qahhar Mudzakar menuntut agar seluruh pasukan gerilya Sulawesi-Selatan dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) tanpa syarat.

Pertentangan inilah di kemudian hari makin besar hingga menciptakan konflik antara KGSS dengan Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan gerakan DI/TII di Sulawesi-Selatan. Oleh Anhar Gonggong (1990: 35) membaginya menjadi beberapa perubahan: diawali oleh KGSS berubah menjadi TKR, dan kemudian menjadi DI/TII yang berafiliasi dengan gerakan Kartosuwiryo di Jawa-Barat, dan kemudian menjadi RPII (Republik Persatuan Islam Indonesia) namun Gerakan Abdul Qahhar Mudzakar lazim dikenal dengan nama DI/TII Sulawesi-Selatan.

Gerakan pemberontakan DI/TII Sulawesi adalah pemberontakan yang paling lama di Indonesia. Diantara sekian banyak pemberontakan menentang pemerintah yang sezaman dan mengakibatkan banyak kerugian di berbagai bidang. Pemberontakan ini berlangsung selama 15 tahun dalam beberapa periode:

Periode I, tahun 1950-1953 di dalamnya terjadi kerumitan penyelesaian masalah gerilya yang berjuang pada masa perang mempertahankan kemerdekaan. Periode II, 1953-1959 di dalamnya terdapat pemberontakan DI/TII dengan berbagai kegiatan yang hampir mencakup seluruh daerah Sulawesi-Selatan. Periode III, 1959-1962 ditandai oleh makin berhasilnya

langkah-langkah pemerintah dalam usaha penyelesaian keamanan dalam negeri, kemudian juga terlihat makin melemahnya kekuatan DI/TII Sulawesi-Selatan sebagai akibat terjadi perpecahan dalam gerakan ini. Periode IV, ialah 1962-1965 tampak adanya usaha Abdul Qahhar Mudzakkar sebagai pimpinan DI/TII di Sulawesi-Selatan untuk bertahan dalam kesendiriannya, ia justru berusaha merealisasikan idenya mendirikan Negara Islam yang dicita-citakan. Ia membentuk negara dengan nama Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII), akhir periode ini adalah tertembak matinya Kolonel TII Abdul Qahhar Mudzakkar yang menyebut dirinya sebagai Chalifah/ Pejabat Presiden RPII (Gonggong: 1990: 35)

Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan yang sangat besar adalah sebuah akumulasi dari berbagai kekuatan kecil yang menyokongnya, hingga perjuangan untuk merealisasikan idenya tersebut dapat terlaksana. Suatu hal yang sangat penting untuk diketahui adalah bagaimana sebuah gerakan dengan orientasi konfrontasi bisa berlangsung lama. Dari mana sebuah gerakan besar dan terlama memperoleh dukungan dana, dan tentu dana yang sangat besar dapat menggerakkan ribuan orang untuk berperang. Kemudahan yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah bagaimana sebuah gerakan memperoleh *suplai* persenjataan, karena persenjataan sangat erat kaitannya dengan regulasi dari suatu pemerintahan yang resmi.

Senjata dan prajurit merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. keduanya adalah sesuatu yang saling melengkapi dengan tujuan memperoleh kemenangan, senjata merupakan nyawa dalam medan tempur apapun jenis pertempurannya dan bagaimanapun kondisi medan tempurnya. Senjata menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh segenap struktur prajurit untuk menghadapi perang, begitulah pentingnya persenjataan dalam peperangan. Demikian pula dengan Gerakan DI/TII di Sulawesi-Selatan agar tetap bisa bertahan dan menyerang musuh, mereka butuh senjata, bagaimanapun baiknya strategi perang yang dimiliki oleh prajurit jika tidak didukung oleh senjata yang sepadan, maka mustahil bisa bertahan lama.

Sangat banyak mobilisasi manusia pada masa Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan antara tahun 1950 hingga tahun 1965. Ada yang bergerak karena kondisi perang, dan ada yang bergerak karena ekonomi yang berafiliasi dengan kepentingan perang. Semua aktivitas subversif (perang) membutuhkan dukungan materi khususnya senjata dan itulah yang penting untuk diketahui karena selama ini informasi mengenai gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan hanya mengungkap “*iconic*” dari gerakan. Sangat jarang yang menyajikan informasi bagaimana suatu gerakan subversif yang besar dan jaringan kepentingan ekonomi bekerja bersama.

Jaringan ekonomi dan perang (gerilya) sering dipisahkan, begitupula dengan *Icon* sebuah gerakan dan *grassroots* sehingga kita kerap hanya mengetahui puncak dari suatu peristiwa, termasuk peristiwa DI/TII Sulawesi-Selatan yang terjadi sangat lama tersebut. Rasanya tidak adil jika hanya menyorot orang-orang yang berperan memobilisasi manusia untuk perang sehingga faktor lain luput dari perhatian. Faktor tersebut seperti persenjataan untuk perang, dan bagaimana cara memperolehnya. Semua itu menurut peneliti adalah sesuatu yang sangat menentukan arus gerak perlawanan DI/TII hingga bisa bertahan begitu lama.

Berangkat dari latar belakang di atas peneliti hendak mengungkap bagaimana kepentingan *ekonomi* dan *kepentingan perang* (*Senjata*) bekerja bersama pada masa Gerakan DI/TII di Sulawesi-Selatan dengan judul: *Jaringan Perdagangan Senjata pada Masa Gerakan DI/TII Di Sulawesi-Selatan Tahun 1950-1965*.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini memfokuskan diri untuk mengulas kepentingan persenjataan pada masa Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan tahun 1950-1965.

Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana jaringan perdagangan senjata DI/TII Sulawesi-Selatan berkolaborasi dengan jaringan perekonomian selama tahun 1950-1965?
2. Bagaimana dampak intervensi DI/TII Sulawesi-Selatan terhadap perekonomian di Sulawesi pada tahun 1950-1965 ?

Analisis Teori

1. Teori Jaringan

Dalam mengungkap jaringan perdagangan pada masa Gerakan DI/TII di Sulawesi-Selatan diperlukan pendekatan yang sesuai dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis jaringan. Analisis jaringan relatif memfokuskan diri pada pola objek yang menghubungkan anggota masyarakat, individual terhadap kelompok (Ritzier *at al.* 2003: 385). Lebih lanjut Wellman (dalam Ritzier 2003: 283) menjelaskan sasaran utama teori jaringan sebagai berikut :

Analisis jaringan memulai dengan gagasan sederhana namun sangat kuat, usaha utama sosiolog adalah mempelajari struktur sosial ... cara paling langsung mempelajari struktur sosial adalah menganalisis pola ikatan yang menghubungkan anggotanya. Pakar analisis jaringan menelusuri struktur bagian yang berbeda di bawah pola jaringan biasa, yang sering muncul ke permukaan sebagai sistem sosial yang kompleks... aktor dan perilakunya dipandang sebagai paksaan oleh struktur sosial ini. Jadi, sasaran perhatian analisis ini bukan pada aktor sukarela, tetapi pada paksaan struktural.

Secara sederhana analisis jaringan merupakan suatu gagasan yang dapat di gunakan dalam mengungkap jaringan perdagangan senjata pada masa DI/TII di Sulawesi-Selatan, akan tetapi dalam hal ini peneliti tidak hanya melihat aktor paksaan dalam melihat peristiwa. Misalnya pada masa DI/TII Sulawesi Selatan terdapat banyak sekali aktor yang memainkan peran vital dalam sebuah gerakan. Aktor sukarela yang dibantah oleh Wellman dalam beberapa hal justru merupakan bagian inti yang banyak mempengaruhi arus gerak sejarah. Khususnya dalam hal logistik, meskipun demikian peneliti tidak menafikan bahwa terdapat aktor paksaan yang turut terjalin dalam sebuah jaringan.

Ciri khas teori jaringan yaitu pemusatan perhatian dilakukan pada struktur makro dan mikro, untuk mengetahui segala sesuatu lebih dalam terkait dengan jaringan. Oleh Wellman dan Wortley (dalam Ritzier, 2003) mengungkapkan bahwa “aktor dalam

jaringan bisa saja individu dan bisa pula kelompok, perusahaan, dan masyarakat”. Hubungan dapat terjadi dalam tingkat skala luas maupun yang lebih sempit. Granoveter (dalam Ritzier *et. Al* 2003) lebih spesifik menjelaskan bahwa

Hubungan atau jaringan yang terjadi dalam skala kecil yaitu dalam lingkup hubungan pribadi dalam struktur jaringan itu. Hubungan ini berlandaskan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi).

Lebih dalam teori jaringan melihat suatu ikatan atau hubungan yang kuat dan lemah dalam suatu analisis sosial, Granoveter (1985) menjelaskan ikatan kuat dan ikatan lemah dalam jaringan sebagai berikut:

“... Misalnya ikatan kuat, hubungan antara seorang dengan teman karibnya, dan ikatan yang lemah adalah misalnya hubungan antara seorang dengan kenalannya. Sosiolog cenderung memusatkan perhatian terhadap orang yang mempunyai ikatan yang kuat atau kelompok sosial. Mereka mengatakan ikatan yang kuat itu lebih penting sedangkan ikatan yang lemah itu tidak penting dijadikan sasaran studi... lebih lanjut Granoveter menjelaskan ikatan lemah dapat menjadi sangat penting contoh ikatan lemah antara dua aktor dapat menjadi jembatan antara dua kelompok yang kuat ikatan internalnya. Tanpa ikatan yang lemah itu kedua kelompok kemungkinan terisolasi secara total. Isolasi ini selanjutnya dapat menyebabkan sistem sosial semakin trefragmentasi. Seorang individu tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi dalam sebuah kelompok yang ikatannya sangat kuat dan akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun masyarakat luas. Karena itu ikatan lemah mencegah isolasi dan memungkinkan individu mengintegrasikan dirinya dengan lebih baik dalam masyarakat lebih luas.” (Granover dalam Ritzier 2003: 283,284)

Selain pentingnya ikatan lemah dalam teori jaringan Granoveter, (dalam Ritzier 2003:284) juga tidak mengingkari ikatan yang kuat sebagai faktor penggerak dalam teori jaringan, hubungan kuat menurutnya mempunyai nilai penting. Orang yang memiliki ikatan kuat memiliki motivasi lebih besar untuk saling membantu dan lebih memberi bantuan.

Prinsip teori jaringan yaitu ikatan antara aktor biasanya simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang makin besar atau makin kecil, sehingga ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks jaringan yang lebih luas. Selanjutnya prinsip jaringan adalah menciptakan pola jaringan yang non acak yang biasanya berakibat pada terbentuknya kelompok jaringan terbatas. Selain dari pola jaringan tersebut juga memungkinkan menciptakan kelompok jaringan silang dari biasanya, hubungan silang tersebut terjadi antara kelompok jaringan maupun individu.

Analisis tentang jaringan dalam mengamati struktur makro dan mikro pada hubungan kuat maupun lemah sangat diperlukan dalam mengungkap jaringan perdagangan senjata pada masa Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan, karena keterlibatan aktor dalam menyuplai senjata kepada pihak-pihak DI/TII sangat berperan penting dalam eksistensi sebuah organisasi gerakan bersenjata dalam arus konflik *underground* maupun konflik ofensif.

2. Teknik Grilya

Sebagai pembuka pada bagian ini, maka perlu dijabarkan apa yang di maksud dengan teknik Gerilya. Oleh Jenderal A.H. Nasution menjabarkannya sebagai berikut:

Pokok-pokok Gerilya.

“... Dalam peperangan bukan hanya kedua belah pihak angkatan bersenjata yang berperang. Peperangan telah menjadi lebih luas dan lebih dalam, antara lain pula karena kemajuan teknik. Peperangan yang dewasa ini meminta sifat yang semesta seantero rakyat baik harta dan tenaganya tersedia untuk diolah, untuk mencapai kemenangan. Semua sumber-sumber yang tersedia harus dipergunakan. Untuk mengalahkan bangsa lawan,

bukan saja untuk dibinasakan angkatan bersenjata, melainkan harus demikian semua susunan dan lembaga politik dan sosial ekonominya. Perang saat ini bergejolak sekaligus di sektor militer, psikologis dan sosial-ekonomis...” (Nasution, 2012: 1)

Menelisik sedikit tentang Teknik Gerilya maka dapat kita lihat arah pemikiran A.H Nasution bahwa gerilya memiliki prinsip yang harus dimengerti yaitu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sekecil apapun sumber daya akan sangat berguna dalam peperangan yang menggunakan Teknik Gerilya. Hal yang menarik lainnya adalah ketika kita ingin menghancurkan pihak lawan maka jangan serang sektor militernya saja, akan tetapi berusaha menyerang sektor psikologinya dan sektor sosial-ekonomis, jika itu dapat dilakukan hingga berhasil maka peperangan akan dimenangkan.

Hal fundamental lainnya yang perlu diketahui tentang gerilya adalah cara mengalahkan musuh di saat persediaan kekuatan tidak memadai, sehingga di perlukan strategi untuk menang. Strategi tersebut menurut Jenderal Nasution (2012:2-3) sebagai berikut:

Perang Gerilya adalah perang si Kecil melawan si Basar...

... Jika suatu bangsa diserang dari luar, maka ia berusaha membela diri. Membela diri tidak berarti menangkis saja, menghindari diri dari pukulan-pukulan, bukan, dengan cara demikian cuma dengan cara pasif, musuh yang menyerang masih akan tetap kuat, dan mampu untuk terus sepanjang masa menyerang. Membela diri itu berarti harus meniadakan ancaman dan pukulan selanjutnya, jadi untuk si penyerang dihancurkan pokoknya di kalahkan.

Taktik Gerilya sejatinya mengajarkan bagaimana berperang dengan penuh perhitungan dan strategi. Indonesia walaupun bukan negara agresor yang memiliki kekuatan bersenjata yang kuat ketika perang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, akan tetapi terbilang cukup sukses menggunakan teknik perang gerilya. Hal yang menarik untuk diamati tentang DI/TII Sulawesi-Selatan yang melakukan konfrontasi terhadap pemerintah

juga menggunakan taktik gerilya. Pertanyaannya sejauh manakah taktik gerilya berhasil diterapkan oleh DI/TII di Sulawesi-Selatan, dan apa saja yang menyebabkan kegagalan penerapan taktik gerilya oleh DI/TII Sulawesi-Selatan (*Apabila dikatakan gagal*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analitis, menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai sumber utama penulisan yang menekankan pada aspek kronologis sebuah peristiwa. Jenis penelitian ini memberikan perhatian khusus mengenai hubungan jaringan perekonomian dengan kebutuhan persenjataan pada masa Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan tahun 1950-1965. Penelitian ini juga berusaha menggambarkan suatu peristiwa yang kompleks tentang usaha DI/TII Sulawesi-Selatan dalam mengintervensi perekonomian di daerah Sulawesi agar gerakan subversif tetap bisa berjalan sesuai tujuan mereka.

Dalam penelitian sejarah pada bagian pengumpulan data disebut juga dengan *Heuristik*. *Heuristic* merupakan langkah awal sebagai sebuah kegiatan mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah atau *evidensi* sejarah (Sjamsuddin, 2007:86). Penelitian ini masih termasuk kedalam penelitian sejarah kontemporer, sehingga penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

Mengingat Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan merupakan gerakan subversif yang paling panjang sejak Indonesia diproklamasikan maka tidak heran jika banyak peneliti yang ingin mengupas dan menyajikan informasi tentang Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan, ada berbagai macam jenis penelitian seperti biografi Abdul Qahhar Mudzakkar, hingga aturan yang berlaku saat itu seperti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) dan Undang-Undang, yang secara langsung berdampak pada Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan. Semua objek penelitian tersebut merupakan studi kepustakaan untuk penelitian ini.

Selain penelitian kepustakaan penelitian berbasis dokumentasi juga diperlukan. Adapun dokumentasi terkait penelitian berupa foto-foto dan video yang dianggap penting dalam merekonstruksi peristiwa sejarah tentang jaringan perdagangan

senjata pada masa DI/TII Sulawesi-Selatan. Untuk menguatkan data-data penelitian yang bersumber dari dokumen (*Arsip*), maka di perlukan Wawancara. Untuk penelitian ini wawancara dilakukan kepada orang-orang yang menyaksikan satu kejadian terkait dengan peristiwa Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan.

Sumber-sumber data yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa benda sumber tertulis maupun sumber lisan kemudian diversifikasi atau diuji melalui serangkaian **Kritik Sumber**, baik yang bersifat intern maupun ekstern (Madjid dan Wahyudi 2014: 223). Setelah melawati tahap kritik, fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan belum banyak bercerita. Fakta tersebut harus disusun dan digabungkan satu sama lain sehingga membentuk cerita peristiwa sejarah. Tahapan ini dikenal dengan *Interpretasi*.

Dalam penulisan sejarah, wujud dari penulisan (historiografi) itu merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan (eksposisi) yang sampai kepada dan dibaca oleh para pembaca atau pemerhati sejarah (Sjamsuddin, 236: 2007). Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyampaikan informasi-informasi yang bersifat kebaruan dan dengan bahasa komunikatif.

Historiografi dalam artian akademik juga dapat dikatakan sebagai laporan penelitian. Untuk laporan penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan gambaran tentang Gerakan DI/TII Sulawesi-Selatan Tahun 1950-1965 berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya dengan bahasa yang mudah dipahami pembaca.

HASIL PENELITIAN

A. Ekspedisi Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRI-PS)

Situasi Sulawesi-Selatan semenjak pendaratan pasukan NICA tidak pernah aman. Para pejuang pendukung Republik mengangkat senjata hampir di seluruh daerah. Keberadaan tentara pendudukan NICA tidak pernah berhenti menindas rakyat Sulawesi-Selatan, malah aksi-aksi represif semakin menjadi-jadi. Beberapa pimpinan perjuangan dieksekusi mati tanpa peradilan, seperti Andi Bau Maseppe dan Andi Makkasau. Kondisi ini mendorong beberapa tokoh Sulawesi-Selatan Seperti Andi Matalatta dan Saleh Lahade untuk berangkat ke Jawa. Dengan tujuan

meminta bantuan kepada pimpinan Republik. (Gonggong, 2004: 78)

Berdasar atas laporan keamanan dari Sulawesi-Selatan Panglima perang Jenderal Besar Sudirman menginstruksikan pembentukan pasukan ekspedisi ke Sulawesi. Pasukan Ekspedisi ini juga bertujuan membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS). Jumlah pasukan yang akan dikirim ke Sulawesi dengan sebanyak 12 ekspedisi. Pasukan ini di pimpin oleh Qahhar Mudzakkar seorang anak Sulawesi. Qahhar diberi tanggungjawab untuk memimpin pasukan ekspedisi dengan pangkat Kolonel. Dalam rangka pengiriman pasukan ke Sulawesi Qahhar mengordinir putra-putra Sulawesi untuk diberangkatkan. Pasukan-pasukan yang dikirim ke Sulawesi berhasil mendarat di berbagai daerah di Sulawesi.

“ Ada sebuah tulisan dalam koran Pedoman Rakyat (1980) yang ditulis Oleh La Megasara yang menyebutkan bahwa panglima Perang Jenderal besar Sudirman memberikan surat mandat kepada Tiga orang yaitu KM (Kahar Mudzakkar), AM (Andi Matalatta), SL (Seleh Lahade) yang konsepnya dibuat oleh Soeprapto dan dipersiapkan di MBO (Markas Besar Oemoem) Sie KLD (Ketentaraan Luar Djawa). Namun belakangan nama KM di hilangkan dalam surat mandat karena ada seseorang yang tidak sepaham dengan KM. Akan tetapi lebih dari itu KM adalah orang yang mengatur (Latihan dan peralatan) pasukan ekspedisi ke Sulawesi.” (pedoman rakyat jumat 11 Januari 1980)

Kedatangan pasukan ekspedisi Sulawesi menambah kuat semangat perlawanan. Bergabungnya dua kekuatan perjuangan antara pasukan ekspedisi dengan Laskar tentu semakin membuat pihak lawan semakin khawatir. Untuk membentuk suatu koordinasi antar para pejuang yang sedang menghadapi Belanda maka diadakan sebuah konferensi di daerah Pacekke pada tanggal 20 Januari 1957.

“Konferensi pacekke berhasil menyusun struktur dan personalia satu Divisi TRI di Sulawesi-Selatan/ Tenggara yang terdiri dari:

Panglima Divisi	: Andi Abdullah Bau Maseppe
Kepala Staf	: Mayor Matalatta
Wakil Kepala Staf	: Mayor Saleh Lahade
Seksi I	:Kapten Muhammadsjah
Seksi II	: Mualwi Saelan
Seksi III	: Kapten Andi Sapada
Seksi IV	: Kapten Andi Oddang

Dalam konferensi itu juga telah ditentukan Tiga Resimen yang masing-masing mempunyai daerah operasi yang di bawahinya. Ketiga resimen tersebut adalah:

1. Resimen I Mempunyai daerah kekuasaan Pare-Pare, Mandar, dan Komandan Resimennya Andi Selle Mattola.
2. Resimen II Mempunyai daerah kekuasaan Makassar dan daerah-daerah sebelah Selatan komandan Resimennya Andi Padjonga.
3. Resimen III Mempunyai daerah sebelah tenggara, Komandan Resimennya Andi Djemma.” (Gonggong 1990: 187)

Antara tahun 1945-1949 merupakan tahun-tahun yang tidak stabil secara politik dan keamanan. Rakyat Sulawesi-Selatan masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kembalinya Belanda ke Sulawesi-Selatan kemudian melakukan tindakan-tindakan represif, sesungguhnya telah memperkuat semangat nasionalisme rakyat Sulawesi-Selatan. Tindakan Belanda tersebut merupakan bom waktu, berupa kebencian rakyat kepada Belanda. Rakyat yang tertindas merasa perlu mendirikan Badan perjuangan (Laskar). Disisi lain pemerintah pusat berusaha mengamankan wilayah Indonesia-Timur. Khususnya Sulawesi dari hegemoni Belanda. Kesamaan tujuan ini merupakan modal bersatunya para Laskar Pejuang dengan pasukan Ekspedisi dari Jawa.

Sesungguhnya pada masa-masa revolusi kekuatan rakyat yang diorganisir oleh kaum bangsawan memang sangat kuat. Peran kaum bangsawan cukup banyak menentukan arah perjuangan. Sedang pasukan-pasukan Ekspedisi yang dikirim dari Jawa juga sangat besar artinya dalam perjuangan. Dalam hal ini Qahhar Mudzakkar selaku komandan pasukan Ekspedisi cukup mampu dalam mengorganisir pasukan dari Jawa.

Peran Qahhar pada masa revolusi tidak dapat dinafikan, Dia adalah salah satu putra terbaik Sulawesi yang berada di Jawa pada masa revolusi. Membentuk badan tempur yang bernama BBM (Barisan Berani Mati), serta memimpin dalam beberapa front pertempuran di Jawa. Saat berada Jakarta Qahhar Mudzakar mendirikan Organisasi bernama KRIS (Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi) dengan tujuan menghimpun orang-orang dari Sulawesi. Kemudian untuk menambah kekuatan pasukan Ekspedisi, Qahhar memimpin pembebasan tahanan dari Nusakambangan dan selanjutnya diberi latihan militer. Setelah itu diberangkatkan menuju Sulawesi dengan nama "Ekspedisi Sulawesi". Beberapa ekspedisi terhitung berhasil, namun beberapa juga gagal dan tertangkap di Bali. (Harvey, 1989: 142)

Perhatian Qahhar hampir sepenuhnya di tujukan ke Sulawesi. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan kembali ke Sulawesi memimpin langsung pasukan TRIPS. Hingga akhir tahun 1949 Qahhar masih berada di MBAD (Markas Besar Angkatan Darat). Baru kemudian diberi mandat sebagai Komandan Group Seberang (KGS) yang berada di bawah perintah Kolonel Bambang Supeno. (Harvey 1989:149-150)

"Malang bagi Kahar, Bambang Supeno berada pada pihak yang kalah dalam perbedaan pandangan di kalangan angkatan bersenjata mengenai watak dan peranan TNI. Sebagai orang Peta lama, Bambang Supeno pentingnya semangat revolusioner dan hubungan erat dengan rakyat; Menteri pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) memimpin orang-orang yang berpendapat bahwa Angkatan Darat harus terdiri dari orang-orang cakap secara teknis dan profesional, dan harus diorganisasikan atas dasar hierarki yang jelas..." (Harvey 1989:149-150)

Dalam perkembangannya terjadi perbedaan pendapat di dalam tubuh Angkatan Darat. Pertentangan-pertentangan di MBAD mulai terasa pada tahun 1949. Terdapat dua golongan besar yang berbeda pendapat. *Pertama* mereka yang menginginkan sebuah struktur dalam tubuh tentara yang profesional. *Kedua* mereka yang hanya menginginkan pentingnya semangat revolusioner bagi pasukan Angkatan Darat. Perpecahan ini

sesungguhnya salah satu benih lahirnya Krisis gerilya di berbagai daerah Khususnya di Sulawesi.

Menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan April 1949, Qahhar berinisiatif melakukan reorganisasi terhadap para pejuang Gerilya di Sulawesi-Selatan. Melalui staf kepercayaannya yang bernama Lettu Saleh Sjahban Qahhar berusaha menemui komandan-komandan kelaskaran di Sulawesi-Selatan dan mengadakan suatu Konferensi di Maros. Hasil Konferensi tersebut membentuk suatu organisasi Gerilya yang bernama KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi-Selatan) dan menunjuk Abdul Qahhar Mudzakar sebagai komandan KGSS. (Gonggong, 1990: 194)

Masalah mulai lahir ketika KMB selesai. Dimana salah satu klausul perjanjian KMB mengharuskan pasukan KNIL Hindia-Belanda dapat diintegrasikan kedalam APRIS (Angkatan Perang Indonesia Serikat). Pembentukan tentara reguler yang semestinya menurut para pejuang adalah terdiri dari unsur pejuang Gerilya dan bukan bekas Opsir KNIL. (Aqamuz, 2009: 63)

Isi Konferensi Meja Bundar (KMB)

- Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
- Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
- Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
- Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
- Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS.
- *Tentara Kerajaan Belanda secepat mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.* (Indonesia Dalam Arus Sejarah, 2012: 553)

Upaya integrasi pasukan KNIL kedalam Angkatan Perang menimbulkan gesekan yang besar. Penyebabnya adalah pihak yang menjadi lawan dalam perang mempertahankan kemerdekaan, diakomdir lebih dulu oleh pemerintah ketimbang para pejuang Gerilya. Nasib mereka yang tidak jelas dalam Angkatan Perang. Hingga dari sinilah lahir konflik yang besar antara KGGS dan Angkatan Perang (TNI).

B. Krisis Gerilya: KGSS-CTN-TKR-DI/TII

Tahun 1950 Let. Kol. Qahhar Mudzakkar dan Let. Kol. Mursito ditugaskan oleh MBAD berangkat ke Sulawesi-Selatan untuk menyelesaikan masalah Gerilya. Di Makassar hal sebaliknya terjadi, yaitu Qahhar Mudzakkar kemudian berbalik memimpin perlawanan kepada Teritorium VII Indonesia-Timur (TT VII). Tindakan Qahhar yang berbeda pendapat dengan panglima Kawilarang didasari oleh keinginannya agar KGGS diintegrasikan secara utuh kedalam wadah TNI. Sementara dipihak pimpinan Teritorium VII menginginkan agar integrasi dilakukan perseorangan dengan syarat-syarat tertentu. (Mattalioe, 1965: 35)

Perselisihan yang terjadi antara KGSS dengan Teritorium VII Wirabuana semakin meruncing, ketika Panglima TT. VII Kawilarang memerintahkan untuk melucuti senjata KGSS. Sehingga ketegangan kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Pada akhir tahun 1950 TNI kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan untuk memasukkan KGGS kedalam wadah TNI. Sebelum itu, semua harus pasukan diintegrasikan dahulu menjadi Corp Tjadangan Nasional (CTN). Lebih awal komandan batalion-batalion tersebut dilantik lebih dahulu. (Corhas, 1982: 41)

Komposisi Corps Tjadangan Nasional

- Batalion Bau Maseppe di Daerah Pinrang.
- Batalion Batu Putih dipusatkan di daerah Makale-Rantepao
- Batalion Arif Rate di Daerah Limbung
- Batalion Wolter Moginsidi dan Batalion 40.000 Jiwa berpusat di Enrekang

Komandan-Komandan Gerilya yang dilantik yaitu, Qahhar Mudzakkar, Aziz Taba, Andi Sele, Andi Sose, Saleh Syakban, Andi Tendriajeng, Syamsul Bachri. Dihadiri oleh pimpinan TT VII Let. Kol A Kosasi, Let. Kol.

Sukowati dari MBAD. Penempatan dislokasi tersebut menurut TNI tidak menguntungkan bagi Qahhar. Dipihak Qahhar mengatakan TNI telah melanggar ketentuan perjanjian damai. Menjelang waktu yang ditentukan untuk melakukan integrasi ke TNI 17 Agustus 1951, ternyata CTN sudah meninggalkan rayon penampungan. Pelantikan CTN menjadi TNI gagal karena Qahhar kembali masuk hutan. Tindakan Qahhar untuk tidak menghadiri pelantikan tersebut membuat penyelesaian Gerilya semakin jauh dari kata sepakat. (Corhas, 1982: 44, Dijk, 1993: 171)

Di tengah pelariannya, Qahhar kemudian mendirikan pasukan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebenarnya inti pasukan tersebut adalah para pejuang gerilya di masa revolusi fisik. Beberapa bulan kemudian tiga komandan batalion anak buah Qahhar bersedia dilantik menjadi TNI. Beberapa orang tersebut antara lain: Andi Selle, Andi Sose, Aziz Taba. Akibat masuknya beberapa batalion tersebut ke TNI telah mengurangi kekuatan pasukan TKR nya Qahhar. (Gonggong 1990: 1, Mattalioe 1994: 166-167)

Qahhar yang tersingkir dari percaturan politik di Angkatan Darat mencari jalan lain untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai pimpinan Gerilya. Qahhar tidak mau dipisahkan dengan anak buahnya. Apabila integrasi terlaksana, maka Qahhar akan kehilangan pengaruh terhadap pasukannya. Pada dasarnya integrasi tersebut akan menyalurkan pasukan gerilya ke berbagai batalion, dan itu bisa merubah kedudukan yang sudah ada. Keinginan Qahhar agar tetap bisa berada di pucuk pimpinan Tentara juga menjadi penyebab kekecewaannya. Ini terungkap dari kesediaan Qahhar untuk integrasi asal petinggi TT VII Wirabuana ditarik. (Dijk, 1993: 172)

Berselang dua tahun kemudian tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1953 TKR berubah menjadi DI/TII. Qahhar memilih bergabung dengan gerakan Kartosuwiryo di Jawa-barat dengan berbagai pertimbangan. Salah satu faktor yang menyebabkan menyeberangnya Qahhar adalah faktor kekecewaan terhadap integrasi TNI. Qahhar menganggap bahwa bergabung dengan DI/TII dapat memperjuangkan nasib dirinya, dan Gerilya di Sulawesi-selatan. Kekecewaan Qahhar yang semula hanya kepada TT VII berkembang menjadi kekecewaan terhadap

Soekarno dan pemerintah Indonesia (Qahhar, 2013: 33-50)

C. Sekitar Proklamasi DI/TII (1952-1954)

Bergabungnya Qahhar Mudzakkar dengan DI/TII Kartosuwiryo sebenarnya memiliki banyak latar belakang. Keduanya sama-sama tersingkir akibat kebijakan yang dijalankan oleh Angkatan Darat. Awalnya Qahhar Mudzakkar adalah perwira menengah yang kalah bersaing dengan Kol. Lembong dan Let. Kol. J.F. Warouw (Eks KNIL) di Brigade XVI (Gonggong, 1990: 212). Perkembangannya selanjutnya Qahhar hanyalah menjadi orang nomor dua di brigade XVI. Hal ini tentu membuat Qahhar semakin tersisih dari brigade XVI, hingga kemudian Qahhar meletakkan jabatannya sebagai Wakil Komandan Brigade XVI.

Kartosuwiryo juga memiliki nasib hampir sama dengan Qahhar. Pada masa perjanjian Renville Kartosuwiryo adalah pihak yang tidak sepatutnya dengan pemindahan pasukan Gerilya ke Jawa-Tengah. Atas pilihannya tersebut membuat Panglima tertinggi Jenderal Besar Sudirman mengangkat Sutoko sebagai pimpinan Gerilya Jawa-Barat (Siliwangi, 1968:346). Pada saat itulah awal perpecahan antara Pasukan Gerilya (*Sabilillah dan Hisbullah*) pimpinan Kartosuwiryo dan Tentara Republik. Qahhar dan Kartosuwiryo adalah dua orang yang tidak mudah berubah pendirian. Apa yang menurutnya benar akan terus diperjuangkan. Hal itu bisa dilihat dari sikap keduanya yang terus-menerus menentang kebijakan Angkatan Darat terkait posisi Gerilya di dalam TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Dugaan kerja sama Kartosuwiryo dan Qahhar Mudzakkar, tidak hanya disebabkan alasan oleh ideologis semata. Sebab Qahhar di Sulawesi-Selatan memiliki pasukan fanatik. Qahhar ingin menjadi orang nomor satu di pasukannya (Mattata, 1962: 494). Sementara keinginannya bertentangan dengan kebijakan yang dijalankan oleh Angkatan Darat. (Dekrit 1 juli 1950) Jalan satu-satunya untuk tetap memperjuangkan keinginannya adalah dengan melakukan perlawanan. Qahhar memilih jalan Konfrontasi dengan Teritorium VII. Dengan begitu Qahhar harus berfikir untuk mendapatkan persenjataan yang kuat untuk mengimbangi kekuatan TNI. Pilihan dengan peluang besar untuk mewujudkan

keinginannya adalah bergabung dengan Kartosuwiryo (DI/TII) dengan syarat bantuan senjata.

Komunikasi antara Qahhar dan Kartosuwiryo telah lama terbangun. Hal ini terungkap dari kurir Qahhar yang membawa pesan kepada Kartosuwiryo (Proses Verbal). Kurir tersebut mengungkapkan bahwa Qahhar meminta bantuan kepada Kartosuwiryo, pada saat sedang terjadi krisis Gerilya di Sulawesi Selatan (proses verbal). Pesan-pesan ini kemungkinan besar terjadi antara awal tahun 1952 atau akhir 1951. (Arsip Saleh Lahade Reg. 188) Berdasarkan pesan tersebut, artinya Qahhar sudah memiliki rencana bergabung dengan DI selepas kegagalan penyaluran CTN (Corps Tjadangan Nasional) ke dalam tubuh TNI. Itulah sebabnya Qahhar pada tahun 1952 menahan diri untuk terlibat kontak langsung dengan TNI. Alasannya karena pasukan Qahhar masih minim persenjataan.

Kondisi kekuatan persenjataan Qahhar selepas kegagalan Integrasi CTN (1951) tidak begitu kuat. Jumlah Senjata KGGs pada tahun 1951 hanya sebanyak 86 pucuk saja. (Arsip Saleh Lahade Reg. 188) Sebuah kenyataan yang disadari oleh Qahhar, bahwa kekuatan bersenjata cukup lemah. Sementara pasukan yang berada di bawah pengaruhnya cukup besar yaitu sekitar 10.000 orang. (Arsip Saleh Lahade 188) Jalan satu-satunya untuk mempertahankan kedudukan pasukan Gerilya yang tersebar di berbagai daerah adalah dengan memperoleh senjata. Dalam kondisi seperti ini Qahhar berusaha melakukan kontak dengan daerah luar yang potensial untuk mendapatkan senjata, termasuk Kartosuwiryo.

Disisi lain hasrat Kartosuwiryo untuk menjadikan Qahhar bagian dari DI/TI sudah ada sejak 1951 (Proses verbal), namun Qahhar masih menolak untuk bergabung dengan DI/TII (Proses Verbal). Alasannya pada waktu itu, karena Qahhar masih mempertimbangkan posisi pasukannya yang fanatik Republik Indonesia. Pertimbangan lainnya adalah potensi dukungan rakyat Sulawesi-Selatan, jika kelak bergabung dengan DI/TII. Hal ini bisa dilihat dari orientasi perjuangan Qahhar sebelum bergabung dengan DI/TII. Pada saat itu Qahhar menggunakan Pancasila sebagai ideologi perjuangan (Mattalioe, 1965:37), Qahhar bahkan menuduh TNI sebagai pejuang Pancasila gadungan. Sikap tersebut lebih kepada tindakan hati-hati Qahhar, karena mayoritas Rakyat Sulawesi-Selatan pada masa

revolusi fisik adalah pendukung Republik Indonesia.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa Qahhar adalah orang yang penuh perhitungan terhadap kondisi yang sedang terjadi. Situasi masyarakat Sulawesi-Selatan pada masa Revolusi Fisik hingga krisis gerilya, sangat tidak menentu. Hal tersebut menjadi alasan Qahhar menunda bergabung dengan Kartosuwiryo. Qahhar merasa perlu mendapatkan dukungan dari rakyat terlebih dahulu, sambil menyusun kekuatan persenjataan. Di sisi lain respon masyarakat Sulawesi-Selatan terhadap di bentuknya Teritorium VII Indonesia Timur (TT VII) tidak begitu baik. Penyebabnya karena sebagian besar para perwira TT VII adalah bekas KNIL (Aqamuz, 2007: 199), yang dulu pernah menjadi lawan dari rakyat yang pro Republik Indonesia.

Aspirasi Qahhar untuk bertahan di posisinya sebagai komandan Gerilya sepertinya akan sulit terealisasi. Hal ini disebabkan oleh kebijakan rasionalisasi tentara yang mengharuskan integrasi gerilya per-orang, bukan per Divisi, seperti kehendak Qahhar. Di tambah lagi keadaan yang ada di Angkatan Darat misalnya. Pada Nasution yang baru menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) lebih berkeinginan untuk melepas kekuatan gerilya dari TNI pasca Revolusi fisik.

Menurut Nasution: Mereka (Gerilya) ... perlu berangsur-angsur setelah lewat puncak-puncak kesibukan 1950-1951 dipulangkan ke daerah asalnya, dimana mereka lebih tepat menjaga keamanan karena telah mengenal daerah dan rakyatnya: dimana pula mereka berangsur-angsur dikembalikan ke dalam masyarakat. . (Nasution 2012: 124)

Berkuasanya Nasution sebagai pimpinan TNI perlahan mengubah haluan kebijakan Angkatan Darat, termasuk juga haluan TT VII, tempat Qahhar memperjuangkan nasib pasukannya. Kondisi yang terjadi di Angkatan Darat tersebut tidak banyak bisa diharapkan oleh Qahhar, sehingga keadaan yang kemudian menuntun Qahhar mempertimbangkan Tawaran Kartosuwiryo tentang DI/TII.

Kerasnya persaingan CTN dengan TT VII membuat kondisi Qahhar berada dalam

pilihan yang sangat berat. Antara memperjuangkan posisinya sebagai Komandan Gerilya, atau menyerah dan pasukannya akan dilebur kedalam berbagai batalion di TT VII. Apabila Qahhar menerima CTN dilebur ke TNI, maka Qahhar perlahan akan dipisahkan dari pasukannya. Hal itu tentu merupakan sesuatu yang merugikan bagi Qahhar. Sementara jika Qahhar ingin tetap berkuasa atas pasukannya, Dia butuh persenjataan yang kuat untuk melawan TNI. Itulah pilihan-pilihan yang berat bagi Qahhar saat itu.

Sementara di tengah ketegangan antara Qahhar dan TT VII, hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Panglima TT VII Kol. Gatot Subroto berhasil membujuk Andi Selle dan Andi Sose masuk ke TNI (Corhas: 1982: 53). Dua orang ini bisa dikatakan memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi pasukannya. Menyerahnya kedua orang tersebut merupakan pukulan berat bagi Qahhar yang sedang menata kembali pasukannya. Muncul kekhawatiran di benak Qahhar apabila kondisi ini di biarkan berlarut-larut akan mempengaruhi psikologis pasukan Gerilya yang lain, yang menyebabkan kondisi Qahhar semakin sulit.

Tidak ada lagi pilihan bagi Qahhar setelah dua orang kepercayaannya menyeberang ke TNI. Posisi terjepit dan kekurangan persenjataan adalah kondisi yang harus cepat diatasi kalau tidak ingin kelah telak dari TNI. Satu-satunya jalan bisa ditempuh oleh Qahhar adalah kembali mempertimbangkan tawaran Kartosuwiryo.

Sekitar bulan Februari 1953 datang utusan Kartosuwiryo di Sulawesi-Selatan untuk menemui Qahhar Mudzakar (Mattalioe 1994:177). Tujuan utusan Kartosuwiryo menemui Qahhar untuk menanyakan kembali kesiapan Qahhar menerima tawaran bergabung dengan DI/TII. Sepertinya Qahhar masih mempertimbangkan dengan sangat teliti tawaran yang kedua kalinya tersebut. Melihat kondisi yang terjadi pada pasukannya, Qahhar tampaknya mengajukan suatu syarat terhadap Kartosuwiryo yakni berupa permintaan bantuan persenjataan. Sebab Qahhar baru memutuskan bergabung dengan DI/TII pada bulan Agustus 1953 (Proklamasi NII). Rentan enam bulan tersebut digunakan oleh Qahhar untuk mengajukan bantuan persenjataan kepada Kartosuwiryo. Tidak mungkin Qahhar dengan mudah bergabung dengan DI/TII jika

Kartosuwiryo tidak bersedia membantu Qahhar yang sedang mengalami kesulitan.

Sebelumnya Qahhar memang sempat meminta bantuan kepada Kartosuwiryo pada tahun 1952 (Proses verbal), namun Qahhar belum bersedia menjadi bagian dari DI/TII (Proses verbal). Tentu bagi Kartosuwiryo, memberi bantuan kepada Qahhar tanpa menjadikannya bagian dari DI/TII merupakan hal yang mustahil, tapi perkembangan situasi berkata lain. Semakin hari posisi Qahhar semakin terdesak. Pasukan-pasukannya jika tidak memiliki persenjataan yang tangguh perlahan akan menyeberang ke TNI. Ditambah lagi Panglima TT VII Kolonel Gatot Subroto yang bersedia menerima pasukan Gerilya dalam bentuk batalion (Uitholling's Taktik) (Dam XIV Hasanuddin: 53) jika tidak cepat direspon maka Qahhar akan kehilangan kekuatannya di Sulawesi-Selatan. Itulah mengapa Qahhar menerima tawaran Kartosuwiryo menjadi bagian dari NII (Negara Islam Indonesia).

Penyebab bergabungnya Qahhar dengan Kartosuwiryo banyak diungkap oleh beberapa sejarawan. Mayoritas mereka menulis kesamaan ideologi (Agama) yang membuat Qahhar memilih bergabung dengan DI/TII. Kondisi masyarakat di Sulawesi-Selatan yang mayoritas beragama Islam juga mempengaruhi pilihan Qahhar bergabung dengan DI.

Seperti yang diungkapkan oleh Anhar Gonggong dalam disertasinya yang berjudul *Abdul Qahhar dan Gerakan DI/TII* sebagai berikut:

“...Mengingat kondisi masyarakat Sulawesi-Selatan yang mayoritas beragama Islam, telah membuka jalan bagi Qahhar Mudzakkhar memilih alternatif menggabungkan diri dalam gerakan DI/TII itu, dengan harapan akan mendapatkan dukungan dari masyarakat Sulawesi-Selatan baik itu dengan langsung aktif atau dengan langsung pasif... dengan perubahan dan tujuan gerakannya itu, nampak perubahan sikap terhadap pancasila dan Islam sebagai ideologi” (Gonggong, 1990: 244).

Alasan lain yang dapat menjadi pertimbangan mengapa Qahhar bergabung dengan DI/TII bukan karena Ideologis, dapat

dilihat pada pesan Qahhar untuk Kartosuwiryo pada tahun 1952, yang menyatakan tidak bersedia bergabung dengan DI/TII. Atas alasan masih banyak rakyat Sulawesi-Selatan yang fanatik Republik Indonesia (Proses verbal) (Arsip Saleh Lahade Reg. 188). Seandainya Qahhar bergabung ke DI/TII atas dasar kesamaan Ideologi, maka Qahhar telah menggabungkan pasukannya DI/TII pada tahun 1951 bukan tahun 1953.

Kenyataannya bahwa Gerakan Qahhar Mudzakkhar baru bergabung dengan DI/TII pada tanggal 7 Agustus 1953 (Mattalioe, 199: 185). Tahun dimana pasukan Qahhar cukup lemah selepas menyeberangnya Andi Sose dan Andi Selle ke TNI. Qahhar juga tidak mungkin masuk ke TNI, sebab jika Qahhar Mudzakkhar masuk TNI, Dia Akan kehilangan posisinya sebagai komandan. Satu-satunya jalan keluar adalah membuka kran komunikasi dengan Kartosuwiryo dengan beberapa syarat.

Sejarawan lain yang membahas alasan Qahhar memilih DI/TII lebih disebabkan kecenderungan kesamaan ideologi (Agama) adalah Harvey.

Keputusan untuk mendasarkan pemberontakan pada Islam dan bukan pada marxisme, tidak hanya merupakan masalah kepercayaan tapi dapat dimengerti menurut situasi khusus yang di hadapi oleh kaum pemberontak watak masyarakat Sulawesi-Selatan, sumber-sumber dukungan mereka, dan watak saingan serta lawan mereka. (Harvey, 1989: 199)

Pertimbangan Qahhar memilih Islam sebagai Ideologi perjuangan memang banyak dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Sulawesi-Selatan yang beragama Islam, tapi kita jarang melihat dari sisi yang berbeda. Perkembangan internal pasukan Gerilya yang berubah begitu cepat selepas kegagalan CTN, adalah faktor yang paling menentukan penggabungan pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Qahhar ke DI/TII. Kondisi persenjataan yang lemah, memaksa Qahhar mencari jalan keluar dengan menggabungkan diri dengan Kartosuwiryo.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpandangan lain dengan mereka yang menulis alasan Qahhar berafiliasi dengan DI/TII karena faktor ideologis (Agama) dan kesamaan tujuan. Untuk tetap bertahan sebagai

pimpinan atas pasukannya, Qahhar butuh senjata. Sementara Kartosuwiryo bersedia membantu asal Qahhar mau bergabung dengan DI/TII. Sebelumnya Qahhar menyatakan diri sebagai pejuang Pancasila sejati bahkan sempat mendirikan Partai Pancasila Indonesia bagi pasukannya. Aktivitas Qahhar tersebut sesungguhnya sangat pro terhadap Indonesia, cuma kecewa dengan TNI sehingga lari ke hutan. Bahkan sangat sulit berfikir bahwa Qahhar punya ide mendirikan sebuah negara jika tidak ada tawaran menguntungkan dari DI/TII.

Sekitar Januari hingga Maret pada tahun 1954, Qahhar berhasil mendapatkan pasokan senjata dari daerah Timur-Timur melalui perantara seorang bangsa Arab. (Keng-Po 24 Maret 1954) Pasokan senjata ini besar dugaan adalah bantuan dari Kartosuwiryo. Hal yang menguatkan alasan ini adalah, antara tahun 1951 hingga 1954 sebanyak empat kali Qahhar melakukan komunikasi dengan Kartosuwiryo (Arsip Saleh Lahade Reg. 188, Mattalioe 1994: 185, Harvey 1989: 208). Selain Kartosuwiryo tidak ada lagi pihak yang dimintai bantuan oleh Qahhar (1951-1954), dengan demikian tidak mungkin ada pihak lain yang mau membantu kalau tidak ada komunikasi dengan Qahhar sebelumnya.

Selama tahun 1954 tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa senjata-senjata Qahhar didatangkan dari bagian Kalimantan-Utara (Tawao). Bantuan Senjata Qahhar hanya berasal dari Timor-Portugis (Keng-Po 24 Maret 1954) Artinya, jika kabar mengenai bantuan senjata kepada Qahhar dari Timor benar terjadi, maka itu adalah bantuan Kartosuwiryo melalui rute Jawa ke Timor-Portugis. Kemudian menunggu situasi yang tepat masuk ke Sulawesi pada awal tahun 1954.

Dari kejadian tahun 1951 hingga 1954, dapat dilihat tawar-menawar terjadi antara Qahhar dan Kartosuwiryo. Tawaran-tawaran itu tentunya memiliki syarat yang cukup berat bagi kedua belah pihak. Walau akhirnya keduanya sepakat bekerja sama, tapi kerja sama tersebut sesungguhnya bukanlah atas bentuk kesamaan ideologi dan tujuan bersama. Mereka bekerja sama lebih atas dasar kebutuhan masing-masing. Qahhar butuh senjata, Kartosuwiryo butuh perluasan wilayah.

Terlepas dari latar belakang keduanya bekerja sama. Satu hal yang perlu dicatat

bahwa setelah bergabungnya Qahhar dengan DI/TII maka penataan Angkatan persenjataan TII semakin baik dari sebelumnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut: yaitu masuknya bantuan persenjataan untuk Qahhar. Sebelumnya TKR pimpinan Qahhar memiliki senjata hanya sekitar kurang lebih 250 senjata yang terdiri dari 86 (Arsip Saleh Lahade Reg. 188) senjata mesin ringan dan sisanya merupakan senjata rampasan. Setelah bergabung dengan DI/TII jumlah persenjataannya tidak kurang 4500 pucuk senjata. Terdiri dari 2056 senjata pasukan Selatan, yang pimpinan oleh Bahar Mattalioe. 800 senjata berat dari Gerungan (1957), dan sisanya milik momoc yang berada langsung di bawah Qahhar Mudzakkar. (Dam XIV Hasanuddin, 1982: 296, 301, 325, 351, 321.) Artinya terjadi peningkatan jumlah senjata yang dimiliki oleh DI/TII. Hal itu terjadi setelah bergabungnya Qahhar dengan DI/TII.

D. Jaringan Perdagangan Senjata DI/TII

DI Jawa-barat memperoleh senjata dari Eropa. Hal tersebut sepertinya baru terdengar bahwa DI (Daroel Islam) telah menjalin hubungan dengan bangsa asing. Sebuah laporan dari Marechausee menyebutkan keterlibatan Pangeran Bernhard dalam masalah perdagangan senjata kepada separatist di Indonesia (Masdijk et al., 2009: 79). Pangeran Bernhard melalui orang dekatnya yang bernama Prof Duyff menghubungi beberapa orang kepercayaan di Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah Shidar Ali seorang diplomat Pakistan di Indonesia.

Shidar Ali bukanlah diplomat biasa, Dia sangat berpengaruh di Eropa, termasuk dalam mempengaruhi sang pangeran. Setidaknya dalam catatan harian Van Masdijk (asisten Pangeran Bernhard) sang diplomat pernah melakukan penyeludupan senjata ke Jogjakarta dan Pakistan melalui London dan Paris. Tidak tanggung-tanggung angka tersebut mencapai 200 juta gulden. Indikasi lain menyebutkan bahwa pangeran Bernhard terpaksa bekerja sama dengan Shidar Ali karena sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan, sehingga penyeludupan senjata dilakukan. Hal ini diperkuat oleh laporan Marechausee mengenai temuannya:

“Deze aantekeningen komen overeen met de rapporten van de

marechaussee: ‘Duitse bankiers vestigen de aandacht van hun relaties op de reis van Fritsche met Prins Bernhard naar Amerika. Zij verklaren, dat Fritsche reeds vele jaren de financiële belangen mede behartigt van Prins Bernhard en Prinses Armgard. Het zou hun bekend zijn, dat zowel Prins Bernhard als Prinses Armgard in geldnood verkeren. Duitse bankiers vermoeden, dat Fritsche in Amerika transacties zal trachten aan te gaan ter versteviging van zijn fortuin en dat van Prins Bernhard. Door voornoemde bankiers werd eveneens de veronderstelling geuit, dat door Fritsche ook gesproken zou worden over de verkoop van de 200 miljoen Soekarno gulden tegen 4 miljoen dollars.’ (Maasdijk et al., 2009: 77)

Dalam laporan tersebut ada nama yang mengatur keuangan pangeran, dia adalah van Fritsche. Angka transaksi penjualan senjata oleh pangeran Bernhard sebesar 200 juta gulden di Amerika, merupakan jumlah yang tidak sedikit. Tampaknya bukan hanya kesulitan keuangan yang memaksa sang pangeran melakukan penyeludupan senjata, tapi lebih dari itu ada keuntungan besar pada perdagangan senjata.

Laporan lain yang juga mengungkap bagaimana sepak terjang para penyeludup ini. Dijelaskan bahwa dalam dekade lima puluhan sang pangeran berhasil melakukan kontak dengan pabrik senjata Amerika, yaitu Lockheed (Simpson 1987:178). Pabrik senjata Lockheed sendiri bukan pemain baru dalam penjualan senjata dengan orang Eropa. Selepas perang dunia II perusahaan ini tengah gencar melakukan kontak dengan penguasa-penguasa Eropa termasuk pangeran Bernhard.

Bagaimana senjata tersebut bisa sampai kepada DI/TII. Hal tersebut merupakan pembahasan cukup panjang sekaligus rumit. Diawali setelah perang dunia II berakhir perusahaan senjata kenamaan yaitu Lockheed mengalami masa-masa sulit akibat persaingan keras dengan Northrop. Pada saat itu pemerintah Amerika Serikat sangat mendorong ekspansi pembuatan senjata masa perang. Hal ini terjadi setelah pangkalannya di Hawaii di hancurkan oleh Jepang. Amerika yang awalnya enggan terlibat dalam perang dan produksi senjata mengeluarkan kebijakan *Land Lase*.

Sebuah kebijakan yang memberikan izin untuk memproduksi senjata secara massal. Masuknya Amerika kedalam arena perang dunia II juga membawa serta produk persenjataannya, pada saat itulah Lockheed berkembang.

“Land Lase adalah kebijakan yang di terapkan oleh Amerika setelah hancurnya Pearl Harbor. Sebelumnya bangsa Amerika menganut doktrin Monroe yaitu semacam politik isolasi. Tidak boleh ikut campur dalam urusan negara lain termasuk dalam hal persenjataan. Doktrin Monroe di perkenalkan oleh presiden ke-5 Amerika James Monroe. Akan tetapi menghadapi situasi yang panas pada perang dunia II memaksa Amerika masuk ke arena peperangan. Akhirnya Amerika mengesahkan *land Lase* melalui kongres pada tanggal 14 Maret 1941. Land Lase merupakan dasar pemerintah Amerika dalam produksi senjata dan penjualan senjata kepada sekutu-sekutunya. (Nur: 2003: 34-35).

Ekspansi Lockheed ke Eropa dimulai oleh seorang yang bernama Bob Gros. Dia adalah petinggi Lockheed yang menjabat sebagai ketua direksi. Dalam ekspansinya ke Eropa, dia memiliki koneksi dengan seorang agen yang bernama Fred Mauser. Rupanya agen ini mempunyai kontak dengan para pejabat tinggi di Eropa. Untuk membantu memuluskan penjualan senjata kepada orang-orang Eropa, Mauser memilih teman lamanya yang bernama Huber Wisbor, seorang warga negara Swiss. Wisbor merupakan satu saluran dana rahasia ke Eropa. Wisbor berprofesi sebagai pengacara di Swiss, dimana profesi ini seperti bankir yang dilindungi oleh penyelidikan. Wisbor dan Mauser juga memiliki rekening rahasia di Swiss, juga merupakan pusat aliran dana Lockheed yang membentang antara Jakarta, Geneva, dan Johannesburg. Sungguh suatu jaringan yang luar biasa. (Simpson 1987: 177)

Di Eropa Mauser tidak hanya mempekerjakan Wisbor. Ada agen lain yang turut berperan, yaitu Teengs Gerriston seorang pahlawan Perlawanan, Dia pernah bekerja sebagai agen Inggris, pernah ditangkap dan hampir di bunuh pada masa pendudukan Nazi. Badannya pernah dipakai untuk eksperimen. Gerriston secara rahasia disewa sebagai konsultan khusus Lockheed dengan gaji

sebesar \$ 18.000 setahun (Simpson 1987: 178). Griston mempunyai beberapa teman lama pada kementerian perekonomian di Den Hag, tidak hanya itu Griston memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Bernhard. Hubungan antara Pangeran Bernhard dan Griston dimulai sebelum perang dunia II. Setelah perang sang pangeran mencari-cari Griston sebagai pahlawan perlawanan. Lebih dari itu Ia adalah teman bermain Ratu Juliana waktu kanak-kanak. Lewat ratu Juliana Griston telah menjadi orang kepercayaan pangeran Bernhard. Pada akhirnya Mauser dan Lockheed membangun kontak dengan pangeran Bernhard. Lockheed merasa sangat penting untuk menjalin hubungan dengan Pangeran, karena posisi pangeran sangat penting di Belanda. Pada saat itu pangeran menjabat sebagai direktur penerbangan KLM dan juga menjadi Inspektur Jenderal dari angkatan bersenjata (Semacam duta besar yang berkuasa penuh). Wajar jika Lockheed sangat membutuhkan tangan pangeran Bernhard di Eropa.

Jaringan internasional tersebut memainkan peran penjualan senjata dalam skala besar. Shidar Ali dan Pangeran Bernhard adalah dua orang pebisnis yang sangat ambisius. Mereka tidak terikat kepentingan ideologis, mereka hanya membangun hubungan bisnis belaka. Sang pangeran masih selalu terkesan akan kejayaan kolonialisme di masa lalu. Usahanya menjual senjata ke Indonesia sepertinya masih terkait dengan nostalgia kejayaan kolonialisme. Bagi Shidar Ali sebagai seorang diplomat yang berada di Indonesia, bukanlah sesuatu yang aneh ketika harus menjual senjata kepada separatis (Dalam hal ini Gerilya DI/TII). Dalam pembicaraannya yang disadap di sebuah bar di Amsterdam mengungkap bahwa Shidar Ali telah memasok sekitar 10.000.000 senjata ke Pakistan.

Menurut laporan Marechaussee pada 1949 terdapat permintaan uang 25.000 Gulden dari pangeran untuk pekerjaan Shidar Ali (Maasdijk 2009). Dalam hal ini untuk mendistribusikan senjata beserta amunisinya kepada DI Jawa-Barat. Distribusi ini menggunakan kapal dagang Belanda yang bernama *Batasfche petroleum Maatshappij* (Maasdijk 2009). Kapal ini adalah kapal minyak yang dipergunakan untuk distribusi senjata. Di duga Kartosuwiryo telah berhasil melakukan kesepakatan dengan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin

oleh Westerling. Memang ini adalah asumsi baru, tapi indikasi kerja sama keduanya cukup kuat. Perkebunan Pieter Riener Van Motman di kawasan Dramaga Bogor (kini IPB Land Huis) ditengarai sebagai tempat keluar masuknya senjata, amunisi, dan logistik untuk Gerombolan bersenjata DI/TII Jawa-Barat .

Seorang Belanda bernama Van Klef disebut-sebut sebagai penghubung penting antara Kartosuwiryo dan pihak Belanda di Indonesia. Di Sisi lain tokoh yang dituduh ikut dalam jaringan pengadaan Senjata DI/TII adalah yaitu Sultan Hamid II juga memiliki kedekatan dengan Ratu Juliana (Maasdijk et al., 2009: 73). Bahkan Marechaussee dalam laporannya menyatakan Shidar Ali bekerja sama dengan Sultan Hamid II (Al Qadrie) dalam suplai senjata kepada kelompok Islam Jawa-Barat. Artinya walaupun kontak yang dibangun tersebut benar adanya berarti penjualan senjata oleh Pangeran Bernard ke Indonesia yang ditujukan kepada kelompok Islam Hisbullah dan Sabilillah telah tercapai.

Pada saat terjadi penyelundupan senjata yang dilakukan oleh Pangeran Bernard ke DI/TII saat itu di Sulawesi-Selatan masih dalam keadaan krisis Gerilya. DI/TII Sulawesi Selatan belum diproklamkan. Antara tahun 1950 hingga 1953 Qahhar belum pernah menyatakan bergabung dengan DI/TII, tetapi komunikasinya dengan Kartosuwiryo telah dibangun sejak tahun 1951. Komunikasi Qahhar untuk Kartosuwiryo bertujuan meminta bantuan. Jelas pada saat-saat itu Qahhar telah menaruh perhatian lebih kepada NII Pimpinan Kartosuwiryo. Hal ini didasari oleh kondisi yang sulit yang sedang dihadapi oleh Qahhar. Tidak berselang beberapa lama kemudian bantuan persenjataan untuk Qahhar di Sulawesi-Selatan tiba melalui daerah Mandar bagian utara. Senjata-senjata itu di datangkan menggunakan perahu kecil agar tidak dicurigai oleh TNI (Arsip Sulawesi Reg. 515, Keng-Po 27 Maret 1954). Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa Qahhar berhasil memperoleh senjata dari Kartosuwiryo dan posisinya semakin kuat. Setidaknya komunikasi Qahhar untuk mendapatkan senjata secara rahasia terpenuhi.

Pasokan senjata untuk DI/TII Sulawesi Selatan tidak hanya berasal dari DI Jawa Barat. Dalam perkembangannya DI/TII Sulawesi-Selatan Banyak mendapatkan senjata dari pasar gelap di Tawao dan Singapura. Senjata-senjata yang di beli oleh DI/TII di Singapura

dan Tawao kemudian diselundupkan menggunakan kapal dagang yang hilir mudik dari Tawao dan Singapura ke Sulawesi-Selatan. Terdapat dua tempat masuk senjata ke daerah de facto DI/TII Sulawesi-Selatan. *pertama* daerah Mandar meliputi Pambuang, Mamuju, Tapalang, Kalukku, Sampaga, Budong-Budong, Bambiloka, dan Pasangkayu. *Kedua* daerah sekitar Luwu yang meliputi daerah Bone Pute, Kolaka, Palopo, Salabangka, dan secara khusus pulau Menui di sekitar daerah tenggara. (Arsip Sulawesi Rahasia Reg. 470, 515, 526, Saleh Lahade Reg. 582)

Untuk wilayah Mandar terdapat rute-rute khusus DI/TII dalam distribusi senjata. Ketika senjata sudah berada di pinggir pantai, senjata tersebut di bawah menuju ke kampung Simulu atau Batu-batu, dari sini dapat ditempuh jalan menuju kampung Parau, Limboro, Tandasura, Renggaeng, Tangan Baru, kemudian terdapat sungai Tinambung-Balanipa. Perjalanan bisa di tempuh dengan menyusuri sungai tersebut ke hulu hingga mendapat pos DI/TII di kampung Peteosang. Perjalanan bisa di lanjut ke arah Allu, Pao, Poda-Poda dan terakhir Pumbidjagi. Di daerah inilah terdapat markas TII daerah Mandar. Sebenarnya rute ini bisa saja diawali langsung dari muara sungai Tinambung-Balanipa, tapi rute tersebut berbahaya, karena ada TNI di sana. Markas ini cukup strategis karena jika terdesak pasukan TII bisa mundur ke daerah Mamasa kemudian masuk ke Toraja dan Enrekang (Arsip Rahasia Sulawesi Reg. 526).

Senjata-senjata yang masuk melalui Mandar sebenarnya sudah bermacam-macam jenisnya. Semua hasil pabrikan senjata seperti, Owen, Bren, Sten, dan Karabin sudah pernah masuk ke Mandar. Senjata-senjata tersebut mendarat melalui pelabuhan-pelabuhan di daerah Mandar yang belum di kuasai TNI, antara Pambuang dan Mamuju. Menurut informasi senjata tersebut di bawah oleh seorang yang bernama Pua Habo yang tinggal di Galung dekat kota Mandar (Arsip Rahasia Sulawesi Reg. 526). Pua Habo mendistribusikan senjata-senjata tersebut ke markas DI/TII menggunakan perahu dari Kampong Pangale.

Untuk memperlancar penyeludupan kurir-kurir tersebut menggunakan sandi-sandi yang sangat rahasia, dan tidak banyak diketahui saat itu. Misalnya untuk mengetahui di mana daerah TII di hutan belantara mereka

memberi tanda dengan membentangkan kain menyerupai bendera kecil. Selain itu sandi-sandi juga digunakan dalam aksi penyeludupan dan pengantar surat-surat rahasia. Seperti tanda flash light yang menggunakan pola panjang dan pendek pada malam hari. (Arsip Rahasia Saleh Lahade Reg. 188)

Penyeludupan senjata yang masuk daerah DI/TII sangat erat kaitannya dengan perdagangan kopra. Perahu-perahu yang lintas mudik di lautan. Itulah yang digunakan oleh pedagang DI/TII untuk melakukan penyeludupan. Tidak hanya senjata yang diselundupkan. Berbagai macam komoditas yang dibutuhkan DI/TII di seludupkan, seperti beras, makanan dan lain-lain. (Laporan KPN Mamuju tahun 1955)

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang DI/TII Sulawesi-Selatan dan jaringan perdagangan senjata yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bergabungnya Qahhar Mudzakkar beserta pasukannya ke DI/TII didasari oleh janji bantuan persenjataan dari Kartosuwiryo. Selain itu kondisi sulit yang dihadapi oleh Gerilya di Sulawesi-Selatan membuat Qahhar menerima tawaran Kartosuwiryo bergabung dengan DI/TII.
2. Usaha DI/TII untuk menguasai perdagangan di Sulawesi-Selatan cukup ampuh untuk mendanai perjuangan mereka. Awalnya DI/TII melakukan blokade ekonomi terhadap pemerintah dengan membeli kopra lebih mahal dari harga Yayasan Kopra (Pembeli pemerintah). Selanjutnya DI/TII memanfaatkan tingginya harga kopra di pasaran untuk ditukar (Barter) dengan senjata. Beberapa lokasi penjualan kopra sekaligus menjadi tempat memperoleh senjata adalah Tawao, Singapura, Filipina, dan Timor. Untuk memperlancar usaha perdagangan DI/TII di daerah penjualan kopra, maka ditempatkan perwakilan dagang di tempat tersebut. Perwakilan dagang tersebut juga berfungsi sebagai pembeli senjata untuk perjuangan DI/TII. Faktor lain yang memperlancar penyeludupan senjata untuk DI/TII adalah keterlibatan dagang Bn. 710 dalam

melindungi kepentingan Gerilya. DI/TII menyiapkan hasil bumi, sedangkan Bn. 710 menukarnya dengan senjata dan amunisi. Sistem barter ini berlangsung atas dasar kepentingan ekonomi. Bergabungnya Permesta (Gerungan) ke DI/TII juga merupakan suntikan persenjataan yang cukup kuat bagi DI/TII.

3. Faktor yang menyebabkan DI/TII dapat berkuasa begitu lama, yaitu DI/TII mendapatkan pasokan senjata yang begitu kuat dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang menjadi penyuplai senjata DI/TII adalah DI/ TII di daerah lain, Barter dengan kopra di luar negeri, dan terakhir dari oknum TNI sendiri yang menjual senjata pihak DI/TII. Sehingga dalam upaya penyelesaian gerilya Sulawesi-Selatan TNI lebih dulu menyingkirkan pihak-pihak yang terdeteksi sebagai penyuplai senjata Qahhar. Kemudian setelah itu Panglima Kodam (M. Jusuf) melakukan taktik isolir total terhadap Gerakan DI/TII. Hingga akhirnya DI/TII terjepit dan berhasil ditumpas pada tanggal 3 Februari 1965.

B. Saran

1. Penelitian ini adalah bagian yang sangat kecil dari peristiwa DI/TII Sulawesi-Selatan. Khususnya jalur logistik persenjataan DI/II Sulawesi-Selatan yang begitu kompleks, sehingga peristiwa pergolakan bersenjata DI/TII tidak dapat dilihat secara hitam putih. Ada banyak kepentingan yang bermain di dalamnya, dan semua itu mempengaruhi kehidupan seluruh lapisan masyarakat pada waktu itu. Olehnya itu penelitian-penelitian tentang jalur logistik DI/TII pada masa akan datang masih sangat aktual untuk dilakukan.
2. Penelitian sejarah mengenai perdagangan senjata, suplai senjata, dan blokade ekonomi pada masa gerakan DI/TII pada dasarnya sangat dekat dengan bidang pertahanan negara. Sehingga penelitian dengan tema serupa bukan saja menjadi objek kajian sejarah. Lebih dari pada itu penelitian serupa untuk pertahanan sebuah negara masih sangat penting untuk dikaji lebih dalam. Tujuannya agar di masa depan dapat dijadikan referensi dalam usaha ketahanan/keberlangsungan sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aqamus Erli (Siti Maesaroh).2007. *Profil Abdul Qahhar Mudzakkar Patriot Pejuang Kemerdekaan Indonesia dan Syahid NII/TII*. Tangerang: Al Abrar.
- Dijk Van. 1993. *Darul Silam Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Gravity Press.
- Indonesia Dalam Arus Sejarah, 2012: 553
- Jarah Dam VII Hasanuddin/ Corhas. 1982. *25 tahun Kodam Hasanuddin*. Makassar: Kodam Hasanuddin.
- Kementerian Penerangan. 1953. *Republik Indonesia Provinsi Sulawesi*.
- Keng- Po 24 Maret 1954 Jakarta.
- Kodam Siliwangi. 1968. *Kodam Siliwangi*. Bandung: Kodam Siliwangi
- Madjid Dian M dan Johan Wahyudi. *Ilmu sejarah sebuah pengantar*. Jakarta: Prenada media Group.
- Mattalioe Bahar. 1965. *Kahar Musakkar Dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Delegasi.
- _____.1994. *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*. Jakarta: Gresindo.
- Mattata Sanusi. 1967. *Luwu dalam Revolusi*. Ipmil: Makassar.
- Tjatanan Batin Seorang Pejuang Islam Revolusioner*.
- Nasution. 2012. *Pokok-Pokok Gerilya (Fundamentals Of Guerilla) dan pertahanan republik indonesia di masa lalu dan masa mendatang*. Jogjakarta: Penerbit Narasi.
- Sjamsuddin Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Jogjakarta: Ombak.

Harvey, B.S., 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari tradisi ke DI/TII*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Simpson 1987. *Bazar Senjata The arms of bazar*.

Ritzier 2003. Teori Sosiologi Modern

Dokumen/ Arsip

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi-Selatan. Inventaris Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Register 470.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi-Selatan. Inventaris Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Register 515.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi-Selatan. Inventaris Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi Register 526.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi-Selatan. Inventaris Arsip Pribadi Muhammad Selah Lahade Register 582. Dos 25.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi-Selatan. Inventaris Arsip Pribadi Muhammad Selah Lahade . Register 188.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi-Selatan. Inventaris Arsip Rahasia Provinsi Sulawesi. Reg. 470.

Gonggong Anhar. 1990. Abdul Qahar Mudzakkar dan DI/TII Sulawesi-Selatan. Depok: UI

Iswandi Nur. 2003. Kebijakan Pemerintah Amrika Serikat dalam pernjulan Senjata pada masa perang dunia II. Depok: Universitas Indonesia